

ANALISIS EKSISTENSI UNIT PENGELOLA KEGIATAN PERGULIRAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN

Tri Wijayanti, Catur Suwastanto, Agus Hardaya

Ilmu Administrasi Negara, STIA Madani, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia

Email: tari24853@gmail.com

ABSTRACT: *Analysis of the Existence of the Management Unit for Women's Group Savings and Loans Revolving Activities in the Gantiwarno District, Klaten Regency. The Activity Management Unit (UPK) is a work unit in the subdistrict area as a result of the District Development Program (PPK) or the National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM MPd). This study aims to describe how UPK exists by using descriptive qualitative methods. This data is collected by observation, interview and documentation methods. The existence of the UPK from revolving activities is influenced by three factors, namely regulation, supervision and institutional capacity, the results of the research show that the factors of the existing regulations are in accordance with the Klaten Regent Regulations even though there are work units that are abolished and work concurrently by other work units, with the provisions in the PNPM MPd Operational Technical Guidelines, the implementation factor of supervision by BKAD of the work units under them is carried out by coordination and sharing between actors, while the implementation of supervision by the Supervisory Board for UPK has been carried out with an administration checklist and control over rotation, the institutional capacity factor is the condition of leadership that has been running conductively so that harmonious relations are established by all actors, while the shared commitment has become the decision of the Inter-Village Deliberation Forum (MAD) which is still upheld as a non-negotiable principle. The author suggests adding UPK staff or continuing to hold work units that have been abolished such as the Funding Team and the Loan Restructuring Team considering that the absence of these teams has added to the workload of other work units because the amount of revolving funds managed is more than 4 billion.*

Keywords: *existence, UPK, revolving, savings and loans for women's groups.*

ABSTRAK: *Analisis Eksistensi Unit Pengelola Kegiatan Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit kerja di wilayah Kecamatan hasil dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), UPK di Kecamatan Gantiwarno berdiri sejak tahun 2006 masih eksis keberadaannya hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi UPK dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data ini dikumpulkan dengan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Eksistensi UPK dari kegiatan perguliran dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu regulasi, supervisi dan kapasitas lembaga. Hasil penelitian menunjukkan faktor dari regulasi yang ada sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten meskipun ada unit kerja yang ditiadakan dan dirangkap kerja oleh unit kerja lain, sedangkan pembagian surplus sudah sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd, faktor pelaksanaan supervisi oleh BKAD terhadap unit kerja di bawahnya dilakukan dengan koordinasi dan sharing antar pelaku, sedangkan pelaksanaan supervisi oleh Badan Pengawas terhadap UPK telah dilakukan dengan ceklist administrasi dan kontrol terhadap perguliran, faktor kapasitas kelembagaan yakni kondisi kepemimpinan yang ada telah berjalan kondusif sehingga terjalin hubungan yang harmonis oleh semua pelaku, sedangkan komitmen bersama telah menjadi keputusan forum Musyawarah Antar Desa (MAD) tetap dipegang teguh sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar. Penulis menyarankan untuk menambah staf UPK atau tetap mengadakan unit-unit kerja yang ditiadakan seperti Tim Pendanaan dan Tim Penyehatan Pinjaman mengingat ketiadaan tim-tim tersebut telah menambah beban kerja dari unit kerja lain karena mengingat jumlah dana perguliran yang dikelola lebih dari 4 Milyar.*

Kata-kata Kunci: *eksistensi, UPK, perguliran, simpan pinjam kelompok perempuan.*

Submitted: Februari 2023, **Accepted:** Februari 2023, **Published:** Maret 2023

ISSN: 2808-7267 (online), Website: <http://journal.fenomena.ac.id>

PENDAHULUAN

Kegiatan pengembangan masyarakat sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dengan pemberdayaan masyarakat akan lebih mandiri terhadap diri mereka sendiri. Merealisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memberdayakan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebagai salah satu dari Program Nasional Pemerintah Indonesia yang merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan warga perdesaan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat di perdesaan, menguatkan kelembagaan perdesaan serta mempercepat terbentuknya kinerja yang lebih baik didalam kerangka tujuan jangka yang panjang dalam mengentaskan dari kemiskinan secara terpadu serta berkelanjutan.

UPK Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten merupakan sebuah unit dengan tugas serta guna pokoknya mengelola seluruh aktivitas yang terdapat didalam Program Pengembangan Kecamatan ataupun kemudian disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan paling utama dalam bidang keuangan dalam program tersebut pada tahun 2006 dan 2007. PNPM Mandiri Perdesaan sudah berakhir diisyrati

setelah berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014. Seluruh aset peninggalan PNPM Mandiri baik yang berbentuk bangunan fisik ataupun aset ekonomi berbentuk dana perguliran seharusnya senantiasa lestari serta berkelanjutan. Guna mengelola dana tersebut dalam upaya tingkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan warga desa berlandaskan pada azas serta prinsip PNPM MPd maka UPK yang berkedudukan di Kecamatan diberikan amanah agar mampu menjaga pelestarian dan keberkelanjutan pelaksanaan program perguliran yang berkesinambungan serta untuk menjamin keamanan serta akuntabilitas penyaluran dana perguliran. Pada implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, terbentuk suatu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) guna melestarikan serta melindungi dari kegiatan hasil PNPM MPd khususnya aktifitas perguliran dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) atau kemudian disebut simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP).

BKAD selaku lembaga yang memayungi UPK, Badan Pengawas UPK dan Tim Verifikasi Perguliran. UPK eks PNPM MPd Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdiri sejak 16 September 2006. UPK Kecamatan Gantiwarno telah berkembang dengan menjalankan dan melestarikan kegiatan perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan modal awal yang berasal

dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahun 2006 dan 2007 melalui Dana Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Yogyakarta - Jawa Tengah. Dari modal awal yang dimiliki UPK Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp 837.069.300,- sampai dengan akhir tahun 2021 telah berkembang dengan total aset yang dimiliki mencapai lebih dari 4,16 Milyar Rupiah.

Perkembangan UPK di Kecamatan Gantiwarno pada khususnya dan seluruh UPK PNPM MPd se Indonesia pada umumnya pada akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 bab XVI pasal 73 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengelola dana bergulir masyarakat atau UPK eks PNPM MPd wajib dibentuk atau bertransformasi untuk menjadi BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Melihat perkembangan dana perguliran eks PNPM MPd tersebut khususnya di Kecamatan Gantiwarno, perkembangan keberlanjutan dana kegiatan perguliran SPKP PNPM MPd oleh UPK Kecamatan Gantiwarno telah berkembang dengan baik dengan memiliki peningkatan jumlah aset yang tinggi dan pendapatan surplus yang besar dibandingkan dengan Kecamatan terdekat lain di sekitar Gantiwarno yang juga mengelola dana perguliran dengan sama-sama mendapat

modal Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPK selama 2 tahun yaitu tahun 2006 dan 2007.

Berikut ini perbandingan kenaikan jumlah aset dan perbandingan jumlah surplus UPK Kecamatan Gantiwarno dengan tiga UPK Kecamatan lain yang terdekat.

Tabel 1: Perbandingan Prosentase Kenaikan Aset

	Nama Kecamatan	Modal Awal BLM PPK 2006 dan 2007	Total Aset s/d 31 Desember 2021	Prosentase Kenaikan
1	Gantiwarno	837.069.300	4.167.496.674	398%
2	Jogonalan	901.245.500	1.408.683.826	56%
3	Klaten Selatan	534.375.000	1.897.804.642	255%
4	Kalikotes	534.375.000	1.394.970.996	161%

Sumber: Laporan Neraca UPK per 31 Desember 2021, Data diolah.

Tabel 2: Perbandingan Prosentase Perolehan Surplus/Defisit

	Nama Kecamatan	Pinjaman SPKP yang beredar di masyarakat	Surplus/Defisit bruto per 31 Des 2021	Prosentase Surplus/Defisit
1	Gantiwarno	2.012.899.700	482.587.144	24%
2	Jogonalan	1.425.859.400	57.248.122	4%
3	Klaten Selatan	1.136.262.000	236.253.761	21%
4	Kalikotes	893.504.600	- 8.166.064	-1%

Sumber: Laporan Neraca UPK per 31 Desember 2021, Data diolah.

Dari tabel perbandingan di atas kenaikan jumlah aset dan perolehan surplus dari UPK Kecamatan Gantiwarno lebih tinggi dari UPK Kecamatan Klaten Selatan maupun UPK Kecamatan Kalikotes bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UPK Kecamatan Jogonalan yang memiliki modal awal paling besar namun perkembangan

jumlah asetnya paling rendah. Sedangkan perbandingan jumlah prosentase tunggakan berdasarkan laporan perkembangan pinjaman per 31 Desember 2021 dari masing-masing Kecamatan di ketahui jumlah tunggakan di UPK Kecamatan Gantiwarno paling kecil yaitu sebesar 3%, dibandingkan dengan UPK Kecamatan Klaten Selatan 12%, UPK Kecamatan Kalikotes 15% dan UPK Kecamatan Jogonalan 26%. (Laporan Perkembangan Pinjaman UPK Kecamatan masing-masing, 2021).

Oleh karena perbandingan prosentase kenaikan jumlah aset dan perolehan surplus yang dimiliki UPK Kecamatan Gantiwarno paling besar dengan prosentase tunggakan paling kecil maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi pengelolaan dana bergulir pada UPK Kecamatan Gantiwarno yang telah berkembang dengan mampu menjaga eksistensi kegiatan dengan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan sampai dengan saat ini. Sehingga peneliti mengambil fokus mengenai analisis eksistensi unit pengelola kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Gantiwarno melalui tiga faktor yang mempengaruhi eksistensi yaitu faktor regulasi, supervisi dan kapasitas lembaga. Mengenai hal tersebut peneliti ingin mengetahui dan menyelesaikan masalah

mengenai penerapan dan pelaksanaan regulasi, supervisi dan kapasitas lembaga pada BKAD-UPK sehingga eksistensi perguliran dapat terus terjaga keberlanjutannya.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi BMT/BTM di pekalongan (Ismanto, 2015) adalah faktor regulasi dan supervisi, hasil penelitian tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro menunjukkan bahwa faktor regulasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga keuangan mikro. Stefan Staschen menyatakan bahwa regulasi akan mengatur bahwa lembaga yang ada akan tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang, sedangkan supervisi bertindak memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai regulasi (Ismanto, 2015). Faktor lain yang mempengaruhi adalah kapasitas lembaga, sedangkan faktor lain yang tidak kalah pengaruhnya adalah kondisi makro ekonomi. Faktor pendukung pengembangan kapasitas kelembagaan adalah kepemimpinan yang kondusif dan komitmen bersama, sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia dan sarana prasana kurang memadai serta inkonsisten peraturan (Sari, 2016)

Adapun variabel yang dijadikan sebagai pengukur dalam penelitian ini adalah

Regulasi, Supervisi dan Kapasitas lembaga sedangkan faktor kondisi makro ekonomi memiliki cakupan nasional yang terlalu luas, oleh karena keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan peneliti sehingga faktor kondisi makro ekonomi tidak diteliti dalam penelitian ini.

1. Variabel Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi (Prawiro, 2018). Regulasi dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati Klaten nomor 36 tahun 2014, AD ART dan atau SOP unit-unit kerja BKAD.

2. Variabel Supervisi

Supervisi berarti sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap bawahannya untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tugas yang digariskan. Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa institusi mematuhi regulasi yang ditetapkan (Burhanuddin, 2005). Supervisi dalam penelitian ini ialah pelaksanaan pengawasan BKAD terhadap unit-unit kerja, pemeriksaan BP UPK terhadap pelaporan kegiatan UPK.

3. Variabel Kapasitas Lembaga

Pengembangan kapasitas kelembagaan adalah kepemimpinan yang kondusif dan komitmen bersama. Kepemimpinan yang kondusif adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (BPKP, 2009).

Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik adalah suatu model kepemimpinan untuk seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, berperan sebagai pemimpin yang sejati dan konsisten. Model kepemimpinan ini mencakup lima syarat pemenuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik menurut Maxwell (2012) yaitu:

- 1) Disiplin
- 2) Mengutamakan skala prioritas
- 3) Percaya diri
- 4) Berinovasi penciptaan hal baru dengan efektif
- 5) Berpengaruh

Dalam organisasi sektor publik menurut Balfour and Wechsler (1996) merumuskan bahwa komitmen organisasi terdiri dari: identifikasi, afiliasi, dan pertukaran.

- 1) Komitmen identifikasi merupakan komitmen organisasional terkait dengan proses karyawan mengidentifikasikan diri dengan misi dan tujuan organisasi. Dimensi komitmen ini berupa perasaan senang

bergabung pada organisasi, meskipun perasaan ini berawal dari pandangan publik bahwa bergabung dengan organisasi publik adalah sebuah kehormatan. Lebih jauh definisi komitmen identifikasi dengan memasukkan faktor perasaan karyawan pada misi, tujuan dan pencapaian organisasi.

- 2) Komitmen afiliasi merupakan persepsi karyawan tentang perhatian dan kepemilikan. Afiliasi diderivasikan dari perasaan karyawan bahwa anggota lain dari organisasi tersebut memiliki perhatian (*care*) terhadap individu. Selain itu, komitmen afiliasi muncul karena rasa kepemilikan dan kebersamaan yang dimiliki bersama-sama. Rasa kepemilikan bertransformasi pada rasa kepemilikan pada organisasi. Dengan kata lain, komitmen afiliasi dipengaruhi keterkaitan psikologis karyawan pada relasi sosial yang telah terbentuk di dalam organisasi.
- 3) Komitmen pertukaran mengacu pada keterikatan psikologis karyawan akibat hubungan resiprokal (simbiosis mutualisme) antara individu dan organisasi. Keterikatan psikologis yang berbasis pertukaran akan menguat bersama dengan pengakuan kontribusi karyawan kepada

organisasi, ketersediaan dukungan dan dorongan positif organisasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian dengan media internet (*internet searching*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian (Suwartono, 2014). Dalam rangkaian peneliti menemukan suatu data, kemudahan dan kecepatan dari *internet searching* lebih membantu dimana dengan ketersediaan serta kelengkapan data dari beberapa tahun tersedia. Pencarian data-data dalam jaringan internet dikerjakan melalui cara seperti *searching*, *browsing*, *surfing* maupun *downloading*.

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor BKAD-UPK Kecamatan Gantiwarno yang terletak di Jalan Raya Jabung No. 23 kompleks (barat) Kantor Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Observasi awal penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dan bulan Januari 2023 dengan mengikuti kegiatan Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban BKAD-UPK tutup buku tahunan.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data terhadap pihak-pihak yang akan diwawancarai yakni menggunakan *purposive sampling* yang berarti teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dapat dikatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sirajudin, 2017). Metode pengumpulan data penelitian yaitu dengan (1) pengamatan (2) wawancara dan (3) dokumentasi (Maleong, 2021). Proses analisis data penelitian yaitu (1) Pengumpulan Data (2) Reduksi Data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BKAD-UPK Gantiwarno berada di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan wilayah kerja meliputi 16 desa. Alasan pemilihan UPK Gantiwarno sebagai lokasi penelitian adalah karena UPK Kecamatan Gantiwarno mempunyai perkembangan paling baik dibanding 3 Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Jogonalan, Klaten Selatan dan Kalikotes dengan total aset yang dimiliki per 31 Desember 2021 lebih dari 4 Milyar dan telah memiliki gedung/kantor sendiri guna melayani dana bergulir pada masyarakat.

Struktur kelembagaan pengelola dana bergulir di UPK Kecamatan Gantiwarno mempunyai kepengurusan sebagai berikut:

- a. Pengurus BKAD terdapat 3 orang meliputi Ketua, sekretaris dan anggota.
- b. Pengurus UPK terdiri 3 orang meliputi Ketua, sekretaris dan bendahara.
- c. Pengurus BP-UPK terdiri 3 orang meliputi Ketua, anggota 1 dan anggota 2.
- d. Pengurus Tim Verifikasi terdiri 2 orang meliputi Ketua dan 1 anggota.
- e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kader Ekonomi Desa
- f. Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Mekanisme Perguliran

Berdasarkan SOP Perguliran di UPK Kecamatan Gantiwarno, syarat-syarat pengajuan memperoleh pinjaman perguliran adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan warga Kecamatan Gantiwarno dibuktikan dengan memiliki e-KTP dan berdomisili tetap
- b. Memiliki usaha meliputi: dagang, bakulan, warungan, toko, jahit, tani, ternak, industri rumahan atau simpan pinjam
- c. Mempunyai kelompok perempuan yang tempat tinggalnya berdekatan (masih dalam 1 wilayah dusun atau desa), adapun persyaratan minimal kelompok perempuan yaitu:

- 1) Jumlah anggota kelompok terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 10 orang
- 2) Ada kepengurusan (ketua, sekretaris dan bendahara)
- d. Berkarakter baik (tidak memiliki catatan tunggakan hutang di program pinjaman lain atau hutang tempat lain)
- e. Bersedia “tanggungrenteng kelompok” antara anggota satu dengan anggota lain
- f. Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Adapun Ketentuan-ketentuan umum dari pinjaman perguliran adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Pinjaman adalah 1,5% per bulan flat atau tetap
- b. Periode angsuran 12 kali (1 tahun lunas)
- c. Plafon pinjaman anggota kelompok maksimal Rp 10.000.000,- namun dengan kriteria tertentu

Jika ada pemanfaat yang meninggal dunia maka kewajiban angsuran menjadi tanggungjawab dari ahli waris dikarenakan belum ada pemutihan atau penghapusan pinjaman.

Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan tiga variabel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi UPK dalam mengelola perguliran simpan pinjam

kelompok perempuan yaitu Regulasi, Supervisi dan kapasitas lembaga.

1. Regulasi

Regulasi yang digunakan mengacu pada peraturan Bupati Klaten Nomor 36 tahun 2014, AD ART dan atau SOP unit-unit kerja BKAD. Adapun regulasi pada kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Gantiwarno sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada atau ketentuan program. Para pelaku atau pelaksana kegiatan juga masih tetap berpedoman pada aturan dari PTO PNPM MPd tahun 2014 yaitu hanya memberikan perguliran tanpa agunan kepada kelompok-kelompok perempuan dan melakukan pembagian surplus bersih dari hasil dana bergulir tetap sesuai dengan presentasi yang telah ditentukan.

Pelaksanaan regulasi dalam pelestarian kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Gantiwarno sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2014 yang tertuang dalam AD ART BKAD yang ada, hal tersebut dibuktikan dengan dimilikinya AD ART BKAD yang ditetapkan sejak tahun 2016 sedang SOP unit-unit kerja dan SOP lainnya sudah dimiliki sejak awal program tahun

2006. Para pelaksana juga sudah dapat mematuhi pedoman dari PTO PNPM Mandiri tahun 2014 dan ketentuan program yaitu mengembangkan UPK dengan melestarikan dana bergulir dengan memberikan pinjaman dana bergulir tanpa agunan khusus untuk kelompok perempuan. Meskipun ada hal mengenai tidak diadakannya Tim Pendanaan karena dapat dirangkap kerja oleh UPK dan Tim Verifikasi sedangkan Tim Penyehatan Pinjaman dapat dirangkap kerja oleh BP dan UPK untuk efisiensi biaya kelembagaan dan tanpa tim-tim tersebut pelaku yang merangkap kerja dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar, sedangkan Tim Pelatih Masyarakat dan Tim Pengelolaan Pengaduan Masalah memang belum terlalu dibutuhkan. Kegiatan pelestarian perguliran selama ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik hal ini bisa dibuktikan dengan eksistensi dari UPK Kecamatan Gantiwarno yang dapat berkembang serta tetap bertahan dan telah berjalan lebih dari 16 tahun, namun penulis menyarankan untuk kembali mengadakan Tim Pendanaan dan Tim Penyehatan pinjaman yang dirangkap kerja maupun dengan menambahkan staf UPK karena dirasa sudah dibutuhkan karena mengingat jumlah dana bergulir

yang dikelola lebih dari 4 Milyar, hal tersebut sudah sesuai dalam ketentuan BKAD dalam Peraturan Bupati yang menyatakan bahwa Kecamatan yang memiliki total kas bank dan pinjaman kegiatan dana bergulir minimal 2 Milyar Rupiah selain pengurus harian UPK wajib menambahkan minimal 1 orang yang mengelola kegiatan dana bergulir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kuat Ismanto (2015) dalam Jurnal Litbang vol. 9 kota Pekalongan yang menyebutkan bahwa jika regulasi ditingkatkan maka eksistensi BMT/BTM akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian juga ini selaras dengan teori dari Anas Iswanto Anwar (2016) dalam buku yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa salah satu langkah strategis dalam pengembangan LKM di Indonesia adalah penciptaan sistem pengaturan (regulasi) yang efisien.

Hal yang sama juga disebutkan dalam teori Abdul Salam (2007) dalam Sustainability koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa sustainability (keberlanjutan dan

kemampuan) KSP dipengaruhi secara positif oleh faktor dari efektivitas regulasi.

2. Supervisi

Supervisi dapat dinilai dari pelaksanaan pengawasan BKAD terhadap unit-unit kerja, dan pemeriksaan BP UPK terhadap pelaporan kegiatan UPK. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati klaten nomor 36 tahun 2014 yaitu BKAD memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unit-unit kerja dibawahnya dengan pelaksanaan supervisi seperti monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan. Sedangkan menurut buku PTO PNPM MPd penjelasan X menjelaskan bahwa BP UPK merupakan lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melaksanakan monitoring, supervisi dan pengawasan kepada UPK.

Supervisi BKAD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari UPK, badan pengawas, dan Tim Verifikasi atau unit kerja di bawahnya yaitu dengan melakukan koordinasi antar pelaku setiap bulan. Sedangkan supervisi BP terhadap UPK telah terlaksana dengan rutin setiap bulannya untuk mengecek administrasi pembukuan, bukti-bukti pengeluaran dan kegiatan

pencairan perguliran dalam satu bulan disertai dengan ceklist, sehingga tidak terjadi penyelewengan dana operasional UPK maupun adanya kelompok fiktif penerima perguliran.

Supervisi atau pengawasan yang ada pada kegiatan perguliran simpan pinjam perempuan di Kecamatan Gantiwarno telah terstruktur dengan baik. Koordinasi antar pelaku dilakukan setiap bulan dengan *sharing* permasalahan yang terjadi. Supervisi Badan Pengawas terhadap UPK dilakukan dengan mengisi lembar ceklist pemeriksaan dan penandatanganan laporan bulanan yang dibuat oleh UPK yang menyatakan bahwa telah disupervisi oleh Badan Pengawas seperti dalam laporan kolektibilitas pinjaman. Kontrol pengawasan Badan Pengawas juga mengenai realisasi biaya operasional UPK yang tidak melebihi 40% dari pendapatan, sedangkan prosentase pembagian dari surplus bersih dana bergulir yang ada juga sudah sesuai AD ADRT BKAD yang mengacu pada peraturan bupati yang juga berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd tahun 2014 dengan ketentuan yaitu minimal 50% untuk penambahan modal, maksimal 35% untuk dana kelembagaan dan minimal 15% untuk dana sosial.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori dari Anas Iswanto Anwar (2016) dalam buku yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa salah satu langkah strategis dalam pengembangan LKM di Indonesia adalah penciptaan sistem pengawasan (supervisi) yang efisien.

Hal yang sama juga disebutkan dalam teori Abdul Salam (2007) dalam Sustainability koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa sustainability (keberlanjutan dan kemampuan) KSP dipengaruhi secara positif oleh faktor dari efektivitas supervisi.

3. Kapasitas Lembaga

Kapasitas lembaga dapat dinilai dari bagaimana kepemimpinan yang ada serta komitmen bersama dari semua anggota organisasi. Kondisi kepemimpinan yang kondusif ialah kepemimpinan yang mampu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dengan menggerakkan anggota organisasi. Sedangkan komitmen bersama organisasional terdiri dari: identifikasi, afiliasi, dan pertukaran.

Adapun kepemimpinan dan komitmen yang ada pada kegiatan perguliran simpan pinjam di Kecamatan Gantiwarno sudah terjalin baik dan kondusif. Hal ini dikarenakan pemimpin yang ada pada BKAD maupun UPK dapat menjalin atau membangun hubungan yang baik dengan antar para pelaku kegiatan di tingkat Kecamatan maupun hubungan yang baik dengan pelaku di tingkat desa yaitu KPMD atau kader desa dan para ketua kelompok peminjam serta anggota kelompok dalam artian dapat membina hubungan yang harmonis.

Semua pelaku yang ada di desa maupun Kecamatan baik BKAD, UPK, Tim Verifikasi, BP dan lainnya semua dapat berkomitmen bersama untuk tetap melestarikan kegiatan perguliran yang ada di Kecamatan Gantiwarno. Para pelaksana atau pelaku kegiatan menjadikan komitmen sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar. Komitmen bersama tersebut tertulis dalam berita acara pada saat MAD pertanggung jawaban setiap tahunnya, yang telah ditandatangani oleh Camat, BKAD, UPK, BP, Tim Verifikasi, Kepala desa, KPMD dan ketua kelompok-kelompok perempuan. Komitmen bersama tersebut yang menjadikan semua pelaku melakukan kedisiplinan. Hal ini pula

yang membuat kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Gantiwarno mampu eksis hingga saat ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori dari Anas Iswanto Anwar (2016) dalam buku yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa salah satu langkah strategis dalam pengembangan LKM di Indonesia adalah pengembangan kapasitas kelembagaan.

Hal yang sama juga disebutkan dalam teori Abdul Salam (2007) dalam Sustainability koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa sustainability (keberlanjutan dan kemampuan) KSP dipengaruhi secara positif oleh faktor dari kapasitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan regulasi oleh BKAD yaitu telah memiliki AD ART dan SOP unit-unit kerja yang sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten dan ketentuan program dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd, BKAD bekerja sama dengan baik dengan unit-unit kerja

dibawahnya, unit-unit kerja yang dimiliki yaitu UPK, Badan Pengawas dan Tim Verifikasi perguliran telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan supervisi atau pengawasan telah terstruktur dengan baik yaitu pengawasan BKAD terhadap kinerja dari UPK, Badan Pengawas, dan Tim Verifikasi dilakukan dengan koordinasi dan *sharing* bersama setiap bulan. Sedangkan Supervisi Badan Pengawas terhadap UPK dilaksanakan rutin setiap bulan dengan ceklist administrasi dan tanda tangan laporan bulanan UPK. Faktor kapasitas kelembagaan yaitu kepemimpinan yang kondusif dan komitmen bersama sudah berjalan dengan kondusif dan telah terjalin hubungan kerjasama yang baik. Kepemimpinan yang ada dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sedangkan komitmen bersama untuk melestarikan kegiatan perguliran telah menjadi keputusan MAD dan merupakan prinsip utama yang tidak dapat di tawar.

Saran dari peneliti untuk menambah staf UPK minimal 1 (satu) orang yang mengelola kegiatan dana bergulir karena mengingat jumlah dana perguliran yang dikelola telah lebih dari 4 Milyar, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2014 atau mengadakan unit kerja yang dirangkap oleh unit kerja lain yaitu dengan diadakannya tim pendanaan dan tim penyehatan pinjaman, dengan mengadakan Tim Pendanaan maka

akan mengurangi beban kerja dari UPK dan Tim Verifikasi dalam memutuskan pinjaman yang akan digulirkan sesuai dengan hasil verifikasi. Sedangkan Tim Penyehatan Pinjaman maka akan mengurangi beban tanggungjawab dari UPK dan Badan Pengawas beserta KPMD dan ketua kelompok, mengingat dalam hal meminimalkan jumlah tunggakan terutama UPK beserta KPMD dan ketua kelompok memiliki tanggungjawab yang lebih besar.

REFERENSI

Buku

Sirajudin, Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Electronic (e-book)

BPKP. 2009. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Kepemimpinan yang kondusif*. Retrieved from

<https://www.bpkp.go.id/spip/konten/416/Penyusunan-Pedoman-Teknis.bpkp>

Iswanto Anwar, Anas. 2016. *Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pembangunan ekonomi pedesaan di Sulsel. Biro Ekonomi Setwilda Pemprov Sulsel*. Retrieved from www.academia.edu/35390781/Pengembangan-Lembaga-Keuangan-Mikro-LKM-dalam-Pembangunan-Ekonomi-Pedesaan

Kurniawan, Paulus. Sri Budi, Kembar. 2017. *Being A Leader*. ANDI. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1058870>

Mardiana Yusuf, Ria. Syarif, Darman. 2017. *Komitmen Organisasi*. Nas Media Pustaka. Retrieved from

<http://mguntur.id/files/books/KOMITMEN.pdf>

UPK Kecamatan Gantiwarno. 2021. Materi Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban BKAD-UPK tahun 2021

UPK Kecamatan Jogonalan. 2021. Laporan Neraca Kegiatan Microfinance dan Laporan Perkembangan Pinjaman per 31 Desember 2021

UPK Kecamatan Klaten Selatan. 2021. Laporan Neraca Kegiatan Microfinance dan Laporan Perkembangan Pinjaman per 31 Desember 2021

UPK Kecamatan Kalikotes. 2021. Laporan Neraca Kegiatan Microfinance dan Laporan Perkembangan Pinjaman per 31 Desember 2021

Artikel dari website dengan nama penulis

Salam, Abdul. 2007. *Sustainability koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat*. Pascasarjana UGM. Retrieved from https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23806

Artikel dari website tanpa nama penulis

Pengertian regulasi secara umum, tujuan dan contoh. 2018. Retrived from <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>

Seputar Pengertian, Ciri, Manfaat dan Tujuan Serta Prinsip Pokok dalam Supervisi. 2022. Retrived from <https://www.duniapengertian.com/2014/04/seputar-pengertian-supervisi.html>

Jurnal

Ismanto, kuat. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi BMT/BTM di Pekalongan*. E-Jurnal: STAIN Pekalongan.

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. E-Jurnal: UIN Antasari Banjarmasin.

Sari, Novita. Noor, Irwan. Yudho Presetyo, Wima. 2015. *Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam*

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu. E-Jurnal. Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2014.

Internet/blog

Pemberdayaan masyarakat. 2020.
<https://blog.insanbumimandiri.org/pemberdayaan-masyarakat>
Penelitian dengan Media Internet. 2016.
<https://text-id.123dok.com/document/4yr2dk08z-studi-literatur-internet-searching.html>